

DPRD Kab. Bogor Sumbang 60 Ton Beras dan APD

CIBINONG (IM)- Gerakan uluran tangan untuk menanggapi dampak ikutan pandemi terus bergeliat. Kini, giliran anggota DPRD Kabupaten Bogor menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa puluhan ton beras kepada masyarakat.

Berton-ton beras itu merupakan hasil urunan (iuran dalam istilah Sunda). Setiap anggota dewan menyumbang satu ton beras. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, beras tersebut kemudian dititipkan ke seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) setiap partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Bogor.

Diketahui ada sembilan partai yang memiliki kursi, yakni Gerindra, PKS, Golkar, PPP, PDI Perjuangan, Demokrat, PAN, PKB dan Hanura. "Jadi ini adalah inisiatif dari seluruh teman-teman di DPRD. Mereka menyumbangkan satu ton beras. Bahkan ada yang lebih," kata Rudy, Selasa (20/7). Harapannya, bantuan tersebut dapat

meringankan beban masyarakat selama PPKM darurat. Rudy dan 54 anggota DPRD Kabupaten Bogor lainnya, merasa masyarakat kesulitan selama PPKM darurat ini, terlebih banyak tempat usaha dikurangi jam operasionalnya, bahkan dihentikan.

"Saya juga mengimbau, bagi masyarakat yang berkecukupan agar membantu sesama. Meskipun kami juga tahu kalau semua elemen terdampak PPKM Darurat. Tapi tidak ada salahnya untuk kita berbagi," kata politisi Gerindra itu.

Selain 60 ton beras, ada juga 500 buah baju hazmat untuk diberikan kepada tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas. Pihaknya berharap dengan bantuan itu, pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin meningkat.

"Ini bentuk kepedulian dan dukungan kita kepada tenaga kesehatan, meski jumlahnya tidak banyak. Baju hazmat ini kita akan berikan untuk tenaga kesehatan, khususnya di puskesmas-puskesmas," pungkasnya. ● **gio**

PPKM Darurat Lanjut, Penyekatan Kota Bandung Dikurangi

BANDUNG (IM)- Pemerintah Kota Bandung resmi menambah masa penerapan pembatasan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat seiring instruksi dari Presiden Indonesia, Joko Widodo.

Penambahan masa PPKM darurat di Kota Bandung tersebut, disampaikan langsung Wali Kota Bandung, Oded M Danial di rumah dinas wali kota, Pendopo, Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, Selasa (20/7).

"Diperpanjang sampai dua pekan ke depan, sesuai arahan dari Pak Presiden Joko Widodo secara langsung. PPKM darurat tetap dilanjutkan, terutama untuk wilayah yang berisiko tinggi," kata Oded.

Meski demikian, dituturkan dia, bahwa pemerintah pusat menyerahkan segala kebijakan kepada masing-

masing kepala daerah selama masa perpanjangan PPKM darurat digulirkan.

"Ada beberapa yang diserahkan kepada daerah, misalnya kemarin tentang pergerakan ekonomi masyarakat kecil, pedagang-pedagang, pedagang kaki lima, itu diserahkan ke pemerintah daerah," ucapnya.

Atas dasar itu disebut Oded, pemerintah kota akan melonggarkan sejumlah ketentuan. Utamanya soal relaksasi ekonomi, serta pengaturan jam penyekatan jalan selama perpanjangan PPKM darurat.

"Ada beberapa yang perlu kita relaksasi dan sekarang sedang dibahas sekda. Pertama soal pedagang makanan tetap buka dengan catatan take away. Lalu soal perubahan penyekatan jalan yang diubah," ujar dia. ● **pur**



IDN/ANTARA

SALAT IDUL ADHA DI PERMUKIMAN

Warga melaksanakan shalat Idul Adha di Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Selasa (20/7). Umat muslim tetap melaksanakan ibadah Shalat Idul Adha di tengah pemberlakuan PPKM Darurat dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pemkot Bogor Awasi Penyaluran BST Kemosos di Kota Bogor

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor turut mengawasi penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemosos) melalui PT Pos Indonesia regional Bogor kepada 77.500 kepala keluarga (KK) warga Kota Bogor yang terdampak Covid-19, mulai Senin (19/7).

Wali Kota Bogor, Bima Arya, di Kota Bogor, Senin (19/7), mengatakan, BST tersebut bantuan dari Kemosos kepada warga Kota Bogor yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan belum terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau disebut non-DTKS.

"Besaran bantuan yang diberikan adalah Rp 600.000 per KK untuk periode Mei dan Juni 2021," katanya.

Kemudian, kepada warga Kota Bogor yang terdaftar dalam DTKS ada sebanyak 72.000 KK, juga mendapat BST sebesar Rp 200.000 per KK untuk periode Juli hingga Desember 2021. Warga Kota Bogor yang terdaftar dalam DTKS juga menerima bantuan sosial rutin dari Kementerian Sosial.

Menurut Bima Arya, warga Kota Bogor yang ter-

daftar pada non-DTKS juga menerima bantuan paket sembako dari Posko Logistik Darurat Kota Bogor. "Ini adalah ikhtiar kami, agar semua warga Kota Bogor yang terdampak secara ekonomi bisa terbantu," katanya.

Paket BST yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia regional Bogor maupun paket sembako dari Posko Logistik Darurat Kota Bogor, diantaranya langsung ke alamat penerima bantuan. "Langkah ini dilakukan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas masyarakat. Pemkot Bogor membantu mengawasi penyalurannya," katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Indonesia Kota Bogor, Pupung H, menyatakan, pihaknya mendapatkan amanah dari Kementerian Sosial untuk menyalurkan BST kepada warga Kota Bogor selama 30 hari ke depan.

"BST itu diantarkan ke rumah penerima, yang lokasinya di 28 kelurahan di enam kecamatan di Kota Bogor. Kami menargetkan pendistribusian BLT itu sudah selesai sampai 15 Agustus," katanya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

SHALAT IDUL ADHA DI BOGOR

Sejumlah umat Islam melaksanakan ibadah shalat Idul Adha 1442 H di Jalan Raya Ciliwung, Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/7).

Usulkan Refocusing, DPRD Ikhlas Anggaran Kunker Dipangkas

Para wakil rakyat ini pun sudah sepakat untuk mencoret anggaran kunjungan kerja ke luar negeri atau ke daerah lain. Apabila terpaksa ada kunjungan ke luar daerah, maka melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor akan meniadakan honor surat pertanggungjawaban (SPJ).

CIBINONG (IM)- DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan Bupati dan Wakil Bupati Bogor kembali melakukan refocusing secara parsial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk selanjutnya diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 hingga memberikan bantuan

sosial (bansos) kepada masyarakat yang 'terkapar' pandemi virus korona (Covid-19). Tak hanya mengusulkan, para wakil rakyat ini pun sudah sepakat untuk mencoret anggaran kunjungan kerja ke luar negeri atau ke daerah lain. Apabila terpaksa ada kunjungan ke luar daerah, maka

melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor akan meniadakan honor surat pertanggungjawaban (SPJ).

"Kami tak hanya mengusulkan refocusing APBD untuk penanganan wabah Covid-19 hingga pemberian bansos kepada masyarakat yang 'terkapar', DPRD Kabupaten Bogor juga sudah meniadakan kunjungan kerja ke luar negeri maupun honor SPJ," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa (20/7).

Pria asli Surakarta ini menargetkan anggaran pelatihan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab Bogor diminta untuk difocusing oleh jajarannya. "Selain meniadakan pelatihan SDM ASN, Kami meminta

Bupati-Wakil Bupati Bogor juga menggeser atau merofocusing anggaran infrastruktur, terutama yang besar-besaran anggaran, sementara dari perhitungan waktu pekerjaan tidak akan selesai dalam sisa waktu lima bulan ini," terangnya.

Sementara Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengungkapkan dalam upaya merofocusing secara parsial APBD, jajarannya akan memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki anggaran pembangunan infrastruktur.

"Kami akan memanggil DPU-PR, DPKPP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan dinas teknis lainnya, untuk selanjutnya mengkaji kemungkinan pergeseran atau refocusing anggaran di dinasnya untuk

pembiayaan penanganan wabah Covid-19 hingga pemberian Bansos untuk masyarakat yang terkapar," ungkap Sastra.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan pergeseran atau refocusing APBD ini lebih diprioritaskan kepada proyek yang belum dikerjakan, dilelang atau tak mungkin dikerjakan selama lima bulan tersisa di Tahun 2021 ini.

"Proyek peningkatan jalan dan pembangunan pedestrian Jalan Raya Tegar Beriman, proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang nilai anggarannya besar bisa saja tergeser atau terefocusing, alasannya mungkin tidak dikerjakan dengan baik dan tepat selama lima bulan. Sisa pekerjaan proyek infrastruktur diatas, nanti bisa kita anggarkan lagi di tahun depan," jelasnya. ● **gio**

PWI Kabupaten Bogor Berbagi Daging Kurban

CIBINONG (IM)- Anggota PWI Kabupaten Bogor berbagi daging kurban ke sesama saat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di lingkungan Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jln Bersih-Pusdai Komplek Pemda Kabupaten Bogor.

Selain itu, pengurus dan anggota PWI Kabupaten Bogor, juga dipercaya untuk menyembelih hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1442 H, berupa 1 ekor sapi dan 2 ekor domba.

Penyembelihan hewan kurban dilaksanakan di halaman sekretariat PWI Kabupaten Bogor, Gedung Pusdai, Jln.

Bersih No 1, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa (20/7).

Ketua PWI Kabupaten Bogor, H. Subagiyo mengatakan, hewan kurban yang disembelih merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kemudian, daging kurban disalurkan kepada pengurus dan anggota PWI serta warga yang berada di sekitar Sekretariat PWI.

"Hewan kurban ini bantuan dari Pemkab Bogor, Perumda Tirta Kahuripan dan BPN. Kita apresiasi dan terimakasih atas bantuan ini. Daging kurban juga akan kita salurkan kepada masyarakat



di sekitar sekretariat PWI," ujar H. Subagiyo, di sela acara penyembelihan, Selasa (20/7).

"Penyembelihan hewan kurban ini rutin dilakukan PWI Kabupaten Bogor setiap Idul

Adha, sebagai wujud kepedulian sosial keluarga besar PWI," ujarnya. ● **gio**

Publikasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Pembinaan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Di Kabupaten Bogor Angkatan I S.d III.



DARI 416 Desa di Kabupaten Bogor bantuan samsisade tahun 2021 diberikan kepada 356 Desa dengan total anggaran Rp 318.497.151.644, tersisa 60 Desa yang belum mendapatkan bantuan samsisade dan akan diusulkan dalam anggaran perubahan.

• Kegiatan/Proyek yang diusulkan harus benar-benar dibutuhkan masyarakat dan merupakan hasil musyawarah desa.

• Mengingat saat ini masih kondisi pandemi covid 19, yang mengakibatkan turunya kemampuan ekonomi masyarakat, diminta agar kegiatan samsisade menerapkan pola padat karya, artinya

melibatkan masyarakat miskin atau yang terkena imbas pandemi covid 19 yang tidak termasuk penerima BLT dana desa, PKH, BPNT dan bantuan lainnya. Saya minta dalam RAB harus Terlihat anggaran upah kerja bagi penduduk miskin desa yang bersangkutan.

• Kelola samsisade dengan baik, transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, agar bermanfaat sesuai tujuan dan harapan.

• Pengelolaan kegiatan samsisade harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Ingat, pelaksanaan kegiatan samsisade ini akan disoroti oleh

masyarakat, media massa, LSM, dan aparat penegak hukum. Jangan sampai samsisade yang merupakan program strategis dan sangat dibutuhkan masyarakat ini, mengakibatkan ada kepala desa yang terjerat hukum karena lalai, tidak profesional, tidak transparan dan akuntabel. Mohon para kepala desa mengambil hikmah atas kejadian beberapa kepala desa yang terjerat hukum

• Aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan BPD, Camat, UPTD dan pihak kompeten lainnya dalam rangka efektivitas dan efisiensi kegiatan.

• Terkait dengan ketersediaan anggaran, bagi desa yang sudah mendapatkan bantuan

samsisade tapi pengajuannya belum mencapai Rp 1 milyar, tahun ini tidak dapat mengajukan kembali pada perubahan anggaran. Prioritas yang diajukan pada anggaran perubahan adalah 60 desa yang belum mendapatkan bantuan.

• Bagi desa yang belum memperoleh samsisade dalam APBD 2021 awal dan akan mengusulkan samsisade pada perubahan APBD 2021, agar paling lambat bulan Juni 2021 telah menginput usulan/proposal yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan dan direkomendasikan oleh Camat agar tercantum dalam RKPDP Perubahan 2021.

• Desa yang akan mengu-

sulkan samsisade pada tahun 2022 diharapkan telah mengusulkan kegiatan pada bulan Juni 2021 dan telah diverifikasi oleh tim verifikasi kecamatan serta tercantum dalam RKPDP 2022

• Usulan yang tidak tercantum dalam RKPDP Perubahan 2021 dan RKPDP 2022 tidak akan diakomodir dalam RAPB Perubahan 2021 maupun RAPBD 2022

• Untuk usulan dalam perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022 serta pelaksanaan samsisade 2021 ini agar berkoordinasi dengan DPMD, Bappelbang dan BPKAD. (adv)